

## PEMKAB BARSEL SESUAIKAN ANGGARAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah sedang melakukan proses penyesuaian anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis di wilayah setempat.

"Untuk anggarannya sudah tersedia dan saat ini kita sedang dalam proses penyesuaian anggarannya," kata Penjabat Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan usai meresmikan gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Barito Selatan di Buntok, Jumat.

Ia mengatakan, dirinya juga pada pekan lalu sudah menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Barito Selatan untuk berkoordinasi kepada pemerintah provinsi terkait dengan program tersebut.

"Kita sudah mendapatkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai program makan bergizi gratis ini," terang Deddy Winarwan.

Menurut dia, untuk peluncuran dan sebagainya mengenai program ini akan bersama-sama dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Pada prinsipnya, kata dia, anggaran untuk program tersebut sudah tersedia. Pihaknya saat ini sedang melakukan penyesuaian dan penyusunan untuk kegiatan program makan bergizi gratis ini.

Selain itu, Deddy Winarwan juga menegaskan, pihaknya tegak lurus dengan arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk program pemberian makan bergizi gratis itu.

"Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkomitmen penuh untuk mendukung kebijakan strategis Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," ucap Deddy Winarwan.

Ia berharap, program makan bergizi gratis itu nantinya berjalan lancar dan memberikan manfaat besar terutama bagi pelajar di kabupaten yang berjuduk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini.

Acara peresmian gadung kantor Diskominfo Barsel tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama dan tokoh adat di wilayah setempat.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/740910/pemkab-barsel-sesuai-anggaran-program-makan-bergizi-gratis>, Sabtu, 18 Januari 2025.
2. <https://haikalteng.id/berita/read/6670/pemkab-barsel-sedang-lakukan-proses-penyesuaian-anggaran-program-makan-bergizi-gratis>, Sabtu, 18 Januari 2025.

#### **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Dalam Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pada Pasal 52 disebutkan, Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025 mendefinisikan, Pemberian Makan Bergizi Gratis adalah Program pemberian makan dengan menu lengkap serta memiliki kandungan gizi seimbang sesuai dengan anjuran kontribusi zat gizi terhadap kebutuhan gizi kelompok sasaran sekali makan baik makan pagi atau makan siang. Penerima Manfaat kegiatan Program MBG adalah seluruh siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SLB, pesantren, sekolah keagamaan dan pendidikan layanan khusus serta ibu hamil, ibu menyusui dan anakbalita di sekitar lokasi SPPG (dalam radius 6km/waktu tempuh maksimal 30 menit). Sumber Pendanaan untuk membiayai kegiatan program MBG Tahun 2025 berasal dari DIPA APBN Badan Gizi Nasional tahun 2025 yang dialokasikan di 500-937 SPPG pada awal bulan Januari-Februari 2025, di 2.000 SPPG di bulan April 2025 dan di 5.000 SPPG di Bulan Juli 2025 yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.